DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR

LKIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memenuhi Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun anggaran 2018. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bagansiapiapi, Februari 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ZULFAHMI, ST., MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740428 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. TUGAS POKOK,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 1

1. Tugas Pokok dan Fungsi 1

2. Fungsi 2

3. Struktur Organisasi 2

4. Sumber Daya Manusia 3

C PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI 4

D TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN SISTEMATIKA 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 8

A RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017-2021 8

1). Pernyataan Visi dan Misi 8

2). Sasaran dan Kebijakan Strategis 10

3). Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama 12

B. PERJANJIAN KINERJA 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 24

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2019 25

1. Misi Kesatu 25

Misi Kesatu Sasaran Pertama Indikator Kinerja: 26

2. Misi Kedua 27

Misi Kedua Sasaran Pertama Indikator Kinerja 1: 28

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 2: 30

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 3: 30

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 4: 30

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 5: 30

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 6: 31

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 7: 31

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 8: 31

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 9: 32

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 10: 32

3. Misi Ketiga 34

Misi Ketiga Sasaran Pertama Indikator Kinerja 1 35

Misi Ketiga Sasaran Pertama Indikator Kinerja 2 35

Misi Ketiga Sasaran Kedua Indikator Kinerja 1 36
B. ASPEK KEUANGAN.....39
1. Belanja Tidak Langsung.....39
2. Belanja Langsung.....40
C. EVALUASI KINERJA 41
D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH.....42

BAB IV PENUTUP 44
A. KESIMPULAN.....44
B SARAN 44

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIRTAHUN 2019.....46

LAMPIRAN 47

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir serta Peraturan Bupati Rokan Hilir no 57 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir merupakan bagian perangkat daerah yang berperan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Sebagai instansi perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. TUGAS POKOK,FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

2. Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai pembantu bupati dalam melaksanakan urusan wajib perumahan mempunyai tugas/ fungsi sebagai berikut:

1. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
2. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
3. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
4. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan.
5. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan air bersih/air minum, drainase, jalan lingkungan.
6. Penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan rawan air;
7. Penyelenggaraan pembagunan prasarana dan sarana air minum sanitasi, drainase lingkungan, jalan lingkungan.
8. Pembinaan teknis dan manajemen pengelolaan air bersih pedesaan.
9. Penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan infrastruktur permukiman akibat bencana alam dan kerusuhan sosial.
10. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur/Bupati/Walikota bersama dengan Menteri Teknis.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 57 Tahun 2017 adalah terdiri atas : Tipelogi Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman ditetapkan sebagai Dinas

Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (Dua) Bidang, dengan susunan organisasi, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat membawahi 2 (Dua) subbagian;

2.a. Subbagian Ketatausahaan;

2.b. Subbagian Perencanaan dan Program.

3. Bidang Perumahan Rakyat membawahi :

3.a. Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi dan Registrasi;

3.b. Seksi Penyediaan Perumahan Rakyat; dan

3.c. Seksi Pemeliharaan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

4. Bidang Kawasan Permukiman membawahi :

4.a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;

4.b. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Permukiman; dan

4.c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung sejumlah 48 pegawai dengan susunan kepegawaian sebagaimana dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1

Rekapitulasi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	**Jumlah Sesuai Jabatan**		
	Eselon II	1	
	Eselon III.a	1	
	Eselon III.b	2	
	Eselon IV.a	8	
	Eselon IV.b	-	
	Fungsional Tertentu	-	
	Fungsional Umum	36	
	Tenaga Cleaning Service	8	
	Tenaga Jaga Kantor	3	
	Tenaga Sopir	2	

2.	**Sesuai Pendidikan (PNS)**		
	Strata Tiga	-	
	Strata Dua	2	
	Strata Satu	17	
	Diploma Empat	-	
	Diploma Tiga	1	
	SLTA/Sederajat	27	
	SLTP/Sederajat	-	
	SD/Sederajat	1	
3.	**Sesuai Bidang Pekerjaan**		
	Kepala Dinas	1	
	Sekretariat	12	
	Bidang Perumahan	18	
	Bidang Permukiman	17	

C PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir dalam hal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2019 yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Perubahan struktur Organisasi dan Tupoksi OPD mengkibatkan beberapa kegiatan berbenturan dengan OPD lainnya sehingga harus dilakukan rekonsiliasi dan koordinasi terlebih dahulu. Proses transisi dari OPD lama yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berakibat sedikit terhambatnya proses penyusunan rencana kerja OPD.
2. Revisi anggaran yang berulang kali dilakukan terkait kebijakan Pemerintah Daerah berupa rasionalisasi anggaran dan prioritas penyelesaian pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.
3. Belum tersedianya Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman juga menjadi kendala dalam penyusunan dan perhitungan kebutuhan rumah layak huni yang harus disediakan oleh OPD.
4. Belum terpenuhinya kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan keasrian kota. Menjadi permasalahan lingkungan hidup perkotaan, dengan tidak sebanding tingginya kebutuhan masyarakat dengan perkembangan kota. Masyarakat menginginkan lingkungan yang indah, asri dan sehat,

sedangkan perkembangan, pertumbuhan dan aktivitas kota membuat turunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau perkotaan. Standar minimum kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan sebesar 20% menjadi suatu target yang harus dipenuhi.

5. Belum terpenuhinya penerangan jalan bersumber energi ramah lingkungan dengan memperhatikan penguatan karakter kawasan.
6. Masih minimnya sarana dan prasarana areal pemakaman. Area pemakaman sebagai kebutuhan masyarakat harus diperhitungkan dan penyediaan lahan untuk fasilitas tersebut semakin terbatas, hal ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh OPD sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana areal pemakaman dapat diakomodasi dalam rencana kerja OPD pada tahun-tahun berikutnya.
7. Perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) masih banyak ditemui. Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran sumber-sumber air, baik sumber air tanah maupun sumber air permukaan. Perlu adanya upaya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota dilakukan secara sistematis dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali, terutama kawasan dekat bantaran sungai.

D TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN SISTEMATIKA

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diprcayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menyajikan data pencapaian kinerja (Iperformance results) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentangPetunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan-peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu sistem AKIP.

Pelaporan ini memiliki dua fungsi utama sebagai berikut:

Pertama, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Kedua, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2019 beserta perubahannya. Strategis yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan, namun tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang antara lain gaji dan tunjangan pegawai. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input, output,* dan *outcome.*

Dengan pola pikir seperti disebutkan diatas, maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahPerumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, tahun anggaran 2019 diuraikan melalui 4 (empat) bab, sebagai berikut ;

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilirini, apabila diilustrasikan dalam Gambar adalah seperti pada halaman berikut :

Gambar 1.1

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan HilirTahun Anggaran 2019

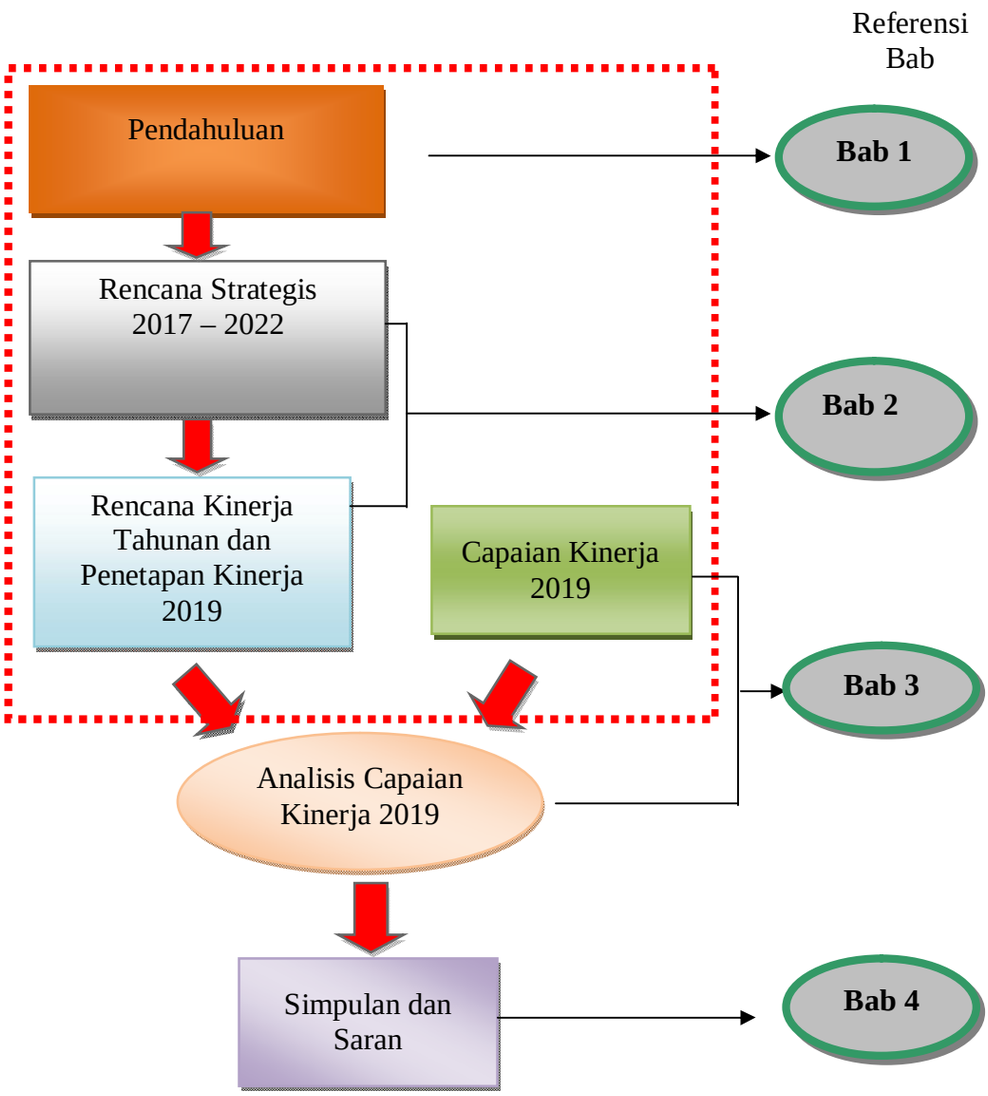

Sistematika penyusunan di atas mengacu kepadaPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017-2021

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2021 telah disahkan tanggal 17 Januari Tahun 2017. Tahun 2019 ini merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra tersebut, pernyataan Visi dan Misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut

1). Pernyataan Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan. Visi juga merupakan cara pandang jauh kedepan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi mempunyai peran yang sangat menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dengan mengacu pada Visi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir “Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri Guna menuju Masyarakat yang Madani, Mandiri dan Sejahtera” maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan Visi, yaitu :

“**Terwujudnya Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas, guna mendukung tercapainya masyarakat mandiri yang sejahtera**"

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir adalah pembantu Bupati dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Oleh karena itu, aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir harus mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang tugasnya, memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki integritas pribadi yang tinggi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang

prima dalam mewujudkan sarana prasarana bidang perumahan yang representatif yang dibutuhkan segenap komponen masyarakat dan menjadi kebanggaan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak bersifat statis dan terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam melaksanakan visi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir senantiasa bekerja keras dengan memperhatikan keselarasan, keserasian dan keseimbangan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal sesuai dengan bidang tugasnya kepada pemerintah, usahawan dan masyarakat.

Oleh karena itu, aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir harus mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang tugasnya, memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki integritas pribadi yang tinggi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima dalam mewujudkan sarana prasarana bidang pekerjaan umum yang representatif yang dibutuhkan segenap komponen masyarakat dan menjadi kebanggaan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak bersifat statis dan terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Misi merupakan tujuan utama ke arah mana perencanaan program instansi pemerintah dapat mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak terkait dapat mengenal dan mengetahui alasan keberadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir mempunyai **misi** sebagai berikut :

I. Meningkatkan pelayanan perumahan berkualitas bagi masyarakat.
II. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman.
III. Meningkatkan kinerja sumber daya dan aparatur dengan mengedepankan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman.

2). Sasaran dan Kebijakan Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur yang merupakan tindakan tindakan nyata untuk mencapai tujuan, oleh karena itu setiap sasaran perlu ditetapkan indikator sasaran yang akan dicapai yang merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkelanjutan. Strategi dan kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan.Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional.Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan Dan Sasaran Strategis
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rokan Hilir

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	*2*	*3*
MISI 1:	**Meningkatkan pelayanan perumahan berkualitas bagi masyarakat**	
1. Meningkatnya penyediaan perumahan	Terpenuhinya kebutuhan masyaraat terhadap perumahan layak huni	Persentase Keluarga yang memiliki rumah layak huni
MISI 2:	**Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman**	
1. Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas berkondisi baik kawasan permukiman	Berkurangnya luasan Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya kawasan kumuh
	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman	Persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik
		Persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik
		Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik
		Persentase drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik
		Persentase tingkat layanan air bersih kawasan permukiman berkondisi baik
		Persentase tingkat layanan air limbah kawasan permukiman berkondisi baik
		Persentase peningkatan kualitas rumah ibadah
		Pesentase ruang terbuka non hijau berkondisi baik
		Persentase sarana prasarana pemakaman yang berkondisi baik
MISI 3:	**Meningkatkan kinerja aparatur dengan mengedepankan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman**	
1. Meningkatnya kinerja sumberdaya dan aparatur OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hilir	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih *(clean and good governance)*	Nilai Evaluasi SAKIP Instansi
		Level Maturitas SPIP
		Nilai Reformasi Birokrasi
	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur bidang perumahan dan permukiman	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi bidang perumahan dan permukiman

3). Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merepresentasikan pertanggung-jawaban instansi pemerintah atas capaian kinerjanya, dalam arti sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai tujuan dan/atau sasaran stratejik yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, secara berkala instansi pemerintah harus mengkomunikasikan informasi capaian kinerja berkaitan dengan pemenuhan sasaran stratejik, melalui mekanisme pelaporan kinerja. Indikator kinerja yang dilekatkan pada sasaran stratejik adalah indikator keluaran (*output*) dan indikator kinerja hasil (*outcome*). Indikator kinerja keluaran dan hasil ini harus merepresentasikan kondisi yang hendak dicapai dalam periode pencapaian sasaran yang biasanya mencakup periode waktu sampai 1 (satu) tahun.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan haisl kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kineja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan tugas pokok organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari unit kerja dibawahnya. Indikaor kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Sebagai sarana akuntabilitas kinerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menetapkan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2019 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja). Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan HilirTahun 2017 s.d 2021 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2017-2021

VISI : Terwujudnya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas guna mendukung tercapainya masyarakat yang mandiri dan sejahtera

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
			2017	2018	2019	2020	2021
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MISI 1: Meningkatkan pelayanan perumahan berkualitas bagi masyarakat							
1. Meningkatnya penyediaan perumahan	Terpenuhinya kebutuhan masyaraat terhadap perumahan layak huni	Persentase keluarga yang memiliki rumah layak huni	2,84%	3,91%	5,35%	6,79%	8,22%
MISI 2: Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman							
1. Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas berkondisi baik kawasan permukiman	Berkurangnya luasan Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya kawasan kumuh	1,77%	1,77%	10,67%	19,57%	28,47%
	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman	Persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	0,77%	1,55%	2,33%	3,11%	3,91%
		Persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	7,67%	15,34%	23,01%	30,68%	38,35%

1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	33,21%	35,07%	36,93%	38,78%	40,64%
		Persentase drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik	0,07%	0,14%	0,20%	0,27%	0,34%
		Persentase tingkat layanan air bersih kawasan permukiman berkondisi baik	36,68%	36,69%	36,70%	36,71%	36,72%
		Persentase tingkat layanan air limbah kawasan permukiman berkondisi baik	0,23%	0,34%	0,45%	0,56%	0,67%
		Persentase peningkatan kualitas rumah ibadah	0%	0%	0,70%	1,41%	2,11%
		Pesentase ruang terbuka non hijau berkondisi baik	0%	5,56%	11,11%	16,67%	22,22%
		Persentase sarana prasarana pemakaman yang berkondisi baik	0%	7,87%	28,1%	48,31%	60,67%

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MISI 3 : Meningkatkan kinerja aparatur dengan mengedepankan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman							
1. Meningkatnya kinerja sumberdaya dan aparatur OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hilir	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih *(clean and good governance)*	Nilai Evaluasi SAKIP Instansi	B	B	BB	BB	BB
		Level Maturitas SPPIP	n/a	n/a	Level 3	Level 3	Level 3
		Nilai Reformasi Birokrasi	n/a	n/a	C	C	C
	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur bidang perumahan dan permukiman	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi bidang perumahan dan permukiman	23%	43%	63%	83%	100%

TABEL 2.3
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	
			INDIKATOR KINERJA	ARAH KEBIJAKAN PROGRAM
1		*2*	*3*	*4*
MISI 1 :	**Meningkatkan pelayanan perumahan berkualitas bagi masyarakat**			
1	Meningkatnya penyediaan perumahan	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap perumahan layak huni	Persentase Keluarga yang memiliki rumah layak huni	1 Program Pengembangan perumahan
MISI 2 :	**Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas berkondisi baik kawasan permukiman**			
1	Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas berkondisi baik kawasan permukiman	Berkurangnya luasan Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya kawasan kumuh	1 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
				2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
				3 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
				4 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
				5 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya
				6 Program Pengembangan Perumahan
				7 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
				8 Program Lingkungan Sehat Perumahan
				9 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1	*2*	*3*	*4*
	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman	1 Persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
			2 Program Pengembangan perumahan
		2 Persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
			2 Program Pengembangan perumahan
		3 Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	1 Program Pengembangan perumahan
		4 Persentase drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik	1 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
			2 Program Lingkungan Sehat Perumahan
		5 Persentase tingkat layanan air bersih kawasan permukiman berkondisi baik	1 Program penyediaan dan pengolahan air baku
			2 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
			3 Program Lingkungan Sehat Perumahan
			4 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1	*2*	*3*	*4*
		6 Persentase tingkat layanan air limbah kawasan permukiman berkondisi baik	1 Program Lingkungan Sehat Perumahan
		7 Persentase peningkatan kualitas rumah ibadah	1 Program Pengembangan perumahan
		8 luas Ruang terbuka non hijau berkondisi baik	1 Program Lingkungan Sehat Perumahan
			2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
		9 Persentase sarana prasarana pemakaman yang berkondisi baik	1 Program Pengembangan perumahan
MISI 3 : Meningkatkan kinerja aparatur dengan mengedepankan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman			
Meningkatnya kinerja sumberdaya dan aparatur OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hilir	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance)	1 Nilai evaluasi SAKIP instansi	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		2 Level Maturitas SPIP	1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1	*2*	*3*	*4*
		3 Nilai Reformasi Birokrasi	1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur bidang perumahan dan permukiman	1 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang pembangunan dan perumahan dan manajerial	1 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

TABEL 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Meningkatnya penyediaan perumahan layak huni	Persentase Keluarga yang memiliki rumah layak huni	jumlah rumah terbangun melalui program berbasis masyarakat / jumlah RTLH	
2	Berkurangnya luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	Persentase berkurangnya kawasan kumuh	Luasan Kawasan Kumuh tertangani/ Luas Kawasan kumuh Kab Rohil	
3	Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas berkondisi baik kawasan permukiman	Persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	panjang jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik / jumlah total panjang jalan	
		Persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	jumlah jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik / jumlah jembatan kaw permukiman	
		Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	panjang jalan berpenerangan di kawasan permukiman dalam kondisi baik /jumlah total panjang jalan di kawasan permukiman	
		Persentase drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik	panjang drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik / jumlah total panjang drainase	
		Persentase tingkat layanan air bersih kawasan permukiman berkondisi baik	Jumlah penduduk terlayani / total penduduk	
		Persentase tingkat layanan air limbah kawasan permukiman berkondisi baik	Jumlah penduduk terlayani / total penduduk	

1	2	3	4	5
		Persentase peningkatan kualitas rumah ibadah	Jumlah rumah ibadah terlayani / total rumah ibadah	
		Pesentase ruang terbuka non hijau berkondisi baik	luas ruang terbuka non publik kawasan permukiman terkelola baik/ luas Ruang terbuka non publik seharusnya	
		Persentase sarana prasarana pemakaman yang berkondisi baik	jumlah sarana prasarana pemakaman dalam kondisi baik / jumlah sarana prasarana pemakaman	

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang diserti dengan indikator kinerja.

Untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan mengukur tingkat pencapaian target, maka dibuat rencana kinerja untuk setiap kegiatan yang disusun dalam suatu program tertentu. Perjanjian kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir yaitu:

1. Sebagai wujud nyata Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi kinerja OPD.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja OPD.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran OPD.
4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring/evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir melalui tahapan-tahapan berikut

1. Penetapan Sasaran Strategis

   Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir mengidentifikasikan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2019, seperti telah dicanangkan dalam Perencanaan stratejik. dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dalam tahun 2019. Sasaran stratejik ini meliputi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

2. Penetapan Program

   Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategisdiidentifikasikan program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Penetapan Kegiatan

   Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam tahun yang bersangkutan. kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi indikator yang diharapkan sehingga pelaksanaannya mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan.

4. Penetapan Target Kinerja

   Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran I Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019**.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kabupaten Rokan Hilir merupakan perwujudan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kabupaten Rokan Hilir untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Penyusunan laporan kinerja didasarkan pada Penetapan Indikator Kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis Hasil Review tahun 2019 yang ditandatangani Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahandengan Bupati Rokan Hilir. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan selaras dengan dokumen Rencana Strategis tahun 2017-2021.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan selanjutnya dianalisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi kelauran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target/encana masing-masing misi dan cara mencapainya melalui Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan. Kemudian dilakukan Pengukuran Kinerja dari masing-maisng indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

85 s.d. 100	:	Sangat Berhasil (SB)
70 s.d. <85	:	Berhasil (B)
55 s.d. <70	:	Cukup Berhasil (CB)
0 s.d. <55	:	Kurang Berhasil (KB)

Dalam tahun anggaran 2019, sasaran stratejik yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir meliputi 5 Sasaran Stratejik yang didukung oleh 10 program dan dijabarkan dalam 149 kegiatan.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2019

1. Misi Kesatu

Misi kesatu yaitu: Meningkatkan pelayanan berkualitas bagi masyarakat, dalam rencana kerja awal tahun 2019 direncakanan dapat terwujud melalui 1 Sasaran dan 1 Program serta 10 Kegiatan.

Tabel 3.1.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi 1

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET2019
Misi 1 : Meningkatkan Pelayanan Perumahan Berkualitas Bagi Masyarakat				
1.	Meningkatnya penyediaan perumahan	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap perumahan layak huni	Persentase Keluarga yang memiliki rumah layak huni	5,35%

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.1.2

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak

INDIKATOR	HASIL			TAHUN 2019		% Capaian
	2016	2017	2018	Target	Realisasi	
Persentase Keluarga yang memiliki rumah layak huni	n/a	2,52 %	2,85 %	5,35%	3,17%	59,25%
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2019						59,25 %

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak dikategorikan Cukup Berhasil. Dengan evaluasi kinerja sebagai berikut

Misi Kesatu Sasaran Pertama Indikator Kinerja:

Pada indikator kinerja Persentase Keluarga yang memiliki rumah layak huni termuat target akumulasi capaian dalam rencana strategis untuk Tahun 2019 adalah sebanyak 630 Unit (5,35%) dan terealisasi sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 144 Unit (3,17%).

Dalam rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pembangunan rumah layak huni yang direncanakan sejumlah 71 Unit dan dapat terealisasi sepenuhnya sebanyak 71 Unit. Adapun capaian

realisasi keuangan untuk program pengembangan perumahan, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.

Capaian Program Pengembangan Perumahan

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1.	Program Pengembangan Perumahan	7.740.000.000,00	7.687.334.469,90	99,32%
	JUMLAH	7.740.000.000,00	7.687.334.469,90	99,32%

Penyerapan dana dari program yang mendukung pencapaian indikatorkinerja sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak terserap 99,32 %dari anggaran yang ditetapkan.

2. Misi Kedua

Misi Kedua yaitu : Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman, diwujudkan melalui 2 sasaran dengan 10 indikator kinerja dalam 4 Program serta 101 Kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi 2

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2019
MISI 2:Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana Dan Utilitas Kawasan Permukiman				
1.	Meningkatnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas berkondisi baik kawasan permukiman	1. Berkurangnya luasan Kawasan Kumuh	1.Persentase berkurangnya kawasan kumuh	10,67%
		2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman	2.Persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	2,33%
			3.Persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	23,01%
			4. Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	36,93%

			5.Persentase drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik	0,20%
			6.Persentase tingkat layanan air bersih kawasan permukiman berkondisi baik	36,70%
			7.Persentase tingkat layanan air limbah kawasan permukiman berkondisi baik	0,45%
			8. Persentase peningkatan kualitas rumah ibadah*	0,70%
			9. Persentase ruang terbuka non hijau berkondisi baik	11,10%
			10.Persentase sarana prasarana pemakaman yang berkondisi baik	28,10%

*Ket *: Belum ditargetkan dkarenakan proses transisi pembentukan OPD Baru dan penyesuaian Tupoksi*

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 10 (sepuluh) indikator kinerja untuk 2 sasaran tersebut, kinerja yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.1

Pengukuran Kinerja Sasaran Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh

INDIKATOR	HASIL			TAHUN 2019		% Capaian
	2016	2017	2018	Target	Realisasi	
1. Persentase berkurangnya kawasan kumuh	n/a	1,77 %	1,77 %	10,67%	1,77%	16,58 %
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2019						16,58 %

Misi Kedua Sasaran Pertama Indikator Kinerja 1:

Dari tabel 3.2.1.1 dapat terlihat bahwa realisasi persentase berkurangnya kawasan kumuh masih di angka 1,77%, dimana nilai tersebut masih sama dengan realisasi tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena kawasan-kawasan kumuh telah disurvey sebelumnya untuk dilaksanakan penataan, namun terkendala karena kawasan kumuh yang merupakan wewenang pemerintah kabupaten adalah kawasan bantaran sungai, sehingga status lahan menjadi masalah ketika akan dilaksanakan penataan, baik merupakan pembangunan atau peningkatan kualitas.

Dari tabel di atas juga dapata terlihat rata-rata capaian kinerja Tahun 2019 untuk Indikator Sasaran Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani adalah 16,58% atau berada pada kategori Kurang Berhasil.

Tabel 3.2.1.2

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Permukiman

INDIKATOR KINERJA	HASIL			TAHUN 2019		% Capaian
	2016	2017	2018	Target	Realisasi	
2. Persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	n/a	0,19%	0,46 %	2,33%	2,16%	92,70%
3. Persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	n/a	0%	1,05 %	23,01%	5,11 %	22,21 %
4. Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	n/a	31,35%	31,35%	36,93%	31,48 %	85,24 %
5. Persentase drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik	n/a	0%	0,04 %	0,20%	0,19 %	95 %
6. Persentase tingkat layanan air bersih kawasan permukiman berkondisi baik	n/a	0%	36,77 %	36,70%	37,91 %	103,29 %
7. Persentase tingkat layanan air limbah kawasan permukiman berkondisi baik	n/a	0%	0,61 %	0,45%	1,31%	291,11%
8. Persentase peningkatan kualitas rumah ibadah	n/a	0%	0%	0,70%	0%	0%
9. Persentase ruang terbuka non hijau berkondisi baik	n/a	0%	0%	11,11%	5,56%	50 %
10. Persentase sarana prasarana pemakaman yang berkondisi baik	n/a	0%	5,6 %	28,1 %	21,35 %	75,98 %
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2019						**90,61 %**

Dari tabel 3.2.1.2 dapat terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Tahun 2019 untuk Sasaran Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman adalah sebesar 90,61 % atau berada pada kategori Sangat Berhasil.

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 2:

Pada indikator kinerja Persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik termuat target akumulasi capaian dalam untuk tahun 2019 adalah sepanjang 43,8 Km dan terealisasi 40,67 Km. Pada Tahun 2019 peningkatan jalan di kawasan permukiman yang dibangun/diperbaiki sepanjang 32,01 Km (217 % dari target tahunan pada Tahun 2019 sebesar 14,7 Km);

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 3:

Pada indikator kinerja Persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik termuat target akumulasi capaian dalam rencana strategis untuk tahun 2019 adalah sebanyak 153 Unit dan terealisasi 34 Unit. Pada Tahun 2019 peningkatan jembatan di kawasan permukiman yang dibangun/diperbaiki sebanyak 27 Unit (52,94 % dari target tahunan pada Tahun 2019 sebesar 51 Unit);

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 4:

Pada indikator Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik termuat target akumulasi capaian dalam untuk tahun 2019 adalah sepanjang 12 Km dan terealisasi 0,2 Km. Pada Tahun 2019 penerangan jalan di kawasan permukiman yang dibangun sebanyak 5 Titik dengan panjang jalan 0,2 Km (5 % dari target tahunan pada Tahun 2019 sebanyak 70 Titik dengan panjang jalan 4 Km);

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 5:

Pada indikator Persentase drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik termuat target dalam capaian rencana strategis untuk tahun 2019 adalah sepanjang 7,71 Km dan terealisasi 5,75 Km. Pada Tahun 2019 peningkatan drainase di kawasan permukiman yang dibangun/diperbaiki sepanjang 5,75 Km (223 % dari target tahunan pada Tahun 2019 sepanjang 2,57 Km);

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 6:

Pada indikator Persentase tingkat layanan air bersih di kawasan permukiman dalam kondisi baik termuat target dalam capaian rencana strategis untuk tahun 2019 adalah 236.598 Jiwa terlayani air bersih dan terealisasi melebihi target 244.385 Jiwa.

Pada Tahun 2019 OPD telah membangun 2 unit instalasi air bersih (SPAM skala permukiman) yang melayani 100 KKatau 500 jiwa, dan 4 lokasi Pamsimas yang melayani 986 KK atau 3.866 Jiwa melalui pembiayaan APBD Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu OPD pada Tahun 2019 terbantu kinerjanya melalui pembiayaan DAK, dengan terbangunnya12 unit instalasi air bersih (pembangunan sumur bor dan sambungan rumah) yang melayani 600 KKatau 3.000 jiwa. Sehingga pada Tahun 2019 OPD berhasil membangunun 18 unit instalasi air bersih dengan jumlah layanan air bersih sebanyak 1.686 KK atau 7.366 Jiwa.

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 7:

Pada indikator Persentase tingkat layanan air limbah di kawasan permukiman dalam kondisi baik termuat target dalam capaian rencana strategis untuk tahun 2019 adalah 2.900 Jiwa terlayani air limbah dan terealisasi melebihi target, yaitu 8.472 Jiwa;

Pada indikator Persentase tingkat layanan air limbah di kawasan permukiman, dari target awal di RENSTRA terbangun 8 unit yang melayani 700 jiwa. Pada Tahun 2019 OPD telah membangun 1 unit instalasi air limbah (IPAL kombinasi MCK) yang melayani 25 KKatau 125 jiwa melalui pembiayaan APBD Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu OPD pada Tahun 2019 terbantu kinerjanya melalui pembiayaan DAK, dengan terbangunnya7 unit instalasi air limbah (IPAL kombinasi MCK) yang melayani 175 KKatau 875 jiwa, dan 7 unit instalasi air limbah di Lembaga Pendidikan (MCK++ dan jaringan perpipaan) yang melayani3.536 Jiwa. Sehingga pada Tahun 2019 OPD berhasil membangunun 15 unit instalasi air limbah dengan jumlah layanan air limbah sebanyak 4.536 Jiwa.

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 8:

Pada indikator Persentase Peningkatan Kualitas Rumah Ibadah memuat target capaian rencana strategis untuk tahun 2019 adalah 0,7% dan terealisasi 0%.

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 9:

Pada indikator Persentase ruang terbuka non hijau dalam kondisi baik termuat target dalam capaian rencana strategis untuk tahun 2019 adalah 11,1 % dan terealisasi 5,6 %. Pada Tahun 2019 ruang terbuka non hijau di kawasan permukiman yang dibangun/diperbaiki sebanyak 1 Unit (100 % dari target tahunan pada Tahun 2019 sebanyak 1 unit);

Misi Kedua Sasaran Kedua Indikator Kinerja 10:

Pada indikator Persentase sarana prasarana pemakaman yang berkondisi baik termuat target dalam capaian rencana strategis untuk tahun 2019 adalah 25 TPU dan terealisasi 19 TPU. Pada Tahun 2019 sarana prasarana pemakaman yang dibangun sebanyak 14 Unit (77,78 % dari target tahunan pada Tahun 2019 sebanyak 18 unit);

Beberapa kendala serupa yang dijumpai sebagai faktor penghambat capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Jauhnya jarak atau *gap* antara proyeksi penganggaran pada saat penyusunan RENSTRA dan penetapan IKU, terhadap realisasi tersedianya anggaran pertahunnya sehingga mempengaruhi proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang berdampak langsung pada output indikator capaian.
2. Beberapa point tugas dan fungsi OPD masih bersinggungan dan tumpang tindih dengan OPD lain, sehingga pada saat finalisasi RKPD, OPD belum mencantumkan beberapa program terkait indikator capaian rumah ibadah dan ruang terbuka non hijau yang menunggu keputusan kepala daerah dalam penyelarasan program, tugas dan fungsi antar OPD.

Tabel 3.2.1.3

Progress Kinerja Misi Kedua

Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas Kawasan Permukiman

SASARAN	Capaian Kinerja			
	2016	2017	2018	2019
1. Berkurangnya Luasan Kawasan Kumuh	n/a	0 %	0 %	16,58 %
2.Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman	n/a	0 %	41,63%	90,61 %
Rata-rata Capaian Kinerja Misi Kedua tahun 2019				53,60 %

Adapun jenis program yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mendukung capaian kinerja misi tersebut diatas yaitu:

Tabel 3.2.2.
Capaian Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Berkondisi Baik Kawasan Permukiman

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1.	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong*	5.900.000,00	5.900.000,00	100,00 %
2.	Program Pengembangan Perumahan*	15.031.980.000,00	13.600.652.525,80	90,48 %
3.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	15.894.970.000,00	15.852.856.000,00	99,74 %
4.	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	25.838.613.723,00	25.805.522.442,95	99,87 %
	JUMLAH	56.771.463.723,00	55.264.930.968,75	97,35 %

Ket: Termasuk didalamnya anggaran untuk penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga*

Berdasarkan tabel tersebut dilihat bahwa realisasi anggaran sudah mencapai 97,35% dari yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah dapat dikategorikan efektif, hanya belum mampumemberikan kontribusi pencapaian kinerjasesuai target perjanjian kinerja kepala dinas. Hal ini disebabkan didalamnya terdapat anggaran penyelesaian pembayarankewajiban kepada pihak ketiga Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada tahun anggaran 2016 yang belum selesai dan dibebankan kepada OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh OPD dalam hal peningkatan kinerja pendukung Misi Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman, maupun solusi yang diharapkan kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kerja sama dengan Pihak Kecamatan dalam melakukan inventaris secara lengkap, terkait kebutuhan masyarakat akan sarana prasarana dan utilitas kawasan permukiman, sehingga menjadi dasar dalam menyusun program dan kegiatan tahunan. Hasil inventaris kebutuhan ini diharapkan dapat menjadi rencana kerja yang disusun tepat sarasan dan tepat guna sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian misi 2 berjalan sesuai dengan yang

diharapkan, karena keberhasilan pelaksanaan kegiatan dilapangan salah satu faktornya adalah dukungan yang baik dari masyarakat tempatan.

2. Mempercepat proses administrasi persiapan kegiatan terutama yang melalui pelelangan.
3. OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan memaksimalkan peluang untuk mendapatkan kegiatan pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN Pemerintah Pusat dalam bentuk Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus. Hal ini agar dapat menjadi alternatif pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian program selain yang bersumber dari APBD Kabupaten. Hal tersebut dapat terlaksana dengan kerjasama yang baik antar OPD terutama BAPPEDA dan internal OPD sendiri dalam menyiapkan data-data pendukung dan pelengkap sehingga kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat diterima oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

3. Misi Ketiga

Misi ketiga yaitu: Meningkatkan kinerja sumber daya dan aparatur dengan mengedepankan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, untuk mewujudkan didukung dengan 2 sasaran dan 5 program.

Tabel 3.3.1.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pendukung Misi 3

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET2019
Misi 3 : Meningkatkan kinerja aparatur dengan mengedepankan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman				
1.	Meningkatnya kinerja sumberdaya dan aparatur OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Rokan Hilir	1.Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih *(clean and good governance)*	1. Nilai evaluasi SAKIP Instansi	BB
			2. Level Maturitas SPIP Instansi	Level 3
			3. Nilai Reformasi Birokrasi	C
		2.Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur bidang perumahan dan permukiman	1. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi bidang perumahan dan permukiman	63,00%

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir menggunakan 4 (empat)indikator kinerja untuk 2 sasaran tersebut, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.3.1.1.

Pengukuran Kinerja Sasaran Terciptanya Tata Pemerintahan yang Baik Dan Bersih *(Clean and Good Governance)*

INDIKATOR	HASIL			TAHUN 2019		% Capaian
	2016	2017	2018	Target	Realisasi	
1. Nilai evaluasi SAKIP Instansi	n/a	B	BB	BB	BB	100%
2. Level Maturitas SPIP Instansi	n/a	n/a	Level 3	Level 3	n/a	n/a
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2019						100 %

Dari tabel 3.3.1.1. dapat terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Tahun 2019 untuk sasaran Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih *(clean and good governance)* adalah sebesar 100% atau berada pada kategori Sangat Berhasil.

Misi Ketiga Sasaran Pertama Indikator Kinerja 1

Indikator kinerja Nilai evaluasi SAKIP Instansi dengan target capaian dalam untuk tahun 2019 adalah nilai BB telah tercapai berdasar laporan hasil audit laporan kinerja OPD dari Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Misi Ketiga Sasaran Pertama Indikator Kinerja 2

Pada indikator kinerja Level Maturitas SPIP Instansi target capaian Nilai Maturitas Level 3 namun belum dilakukan penilaian tingkat maturitas SPIP oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir.

Capaian indikator kinerja mampu mencapai target, faktor penunjang keberhasilan tersebut adalah adanya fasilitasi dan stimulan dari kepala daerah dibantu Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir dalam mendampingi masing-masing OPD untuk memenuhi unsur-unsur maturitas implementasi SPIP, baik melalui workshop dan menurunkan tim asesor per OPD.

Tidak ditemukan kendala berarti dalam pencapaian sasaran Terciptanya Tata Pemerintahan yang Baik Dan Bersih *(Clean and Good Governance).*

Tabel 3.3.1.2.

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bidang Perumahan dan Permukiman

INDIKATOR	HASIL			TAHUN 2019		% Capaian
	2016	2017	2018	Target	Realisasi	
Persentase aparatur yang memiliki kompetensi bidang perumahan dan permukiman	n/a	29,82 %	50,88 %	63,00 %	71,93 %	114,17 %
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2019						114,17 %

Dari tabel 3.3.1.2. dapat terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Tahun 2019 untuk Sasaran Terciptanya Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih *(Clean and Good Governance)* adalah sebesar 114,17 % atau berada pada kategori Sangat Berhasil.

Misi Ketiga Sasaran Kedua Indikator Kinerja 4

Pada indikator kinerjaPersentase aparatur yang memiliki kompetensi bidang perumahan dan permukiman sebagaimana tercantum dalam tabel 3.3.1.2, dikategorikan Sangat Berhasil dengan capaian 114,17 %. Sampai dengan 2019 dari penetapan target 36 orang yang akan ditingkatkan kompetensinya, Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman berhasil melakukan peningkatan kompetensi terhadap 41 orang dengan berbagai macam jenis peningkatan Kompetensi yang dilakukan. Peningkatan kompetensi aparatur juga dilakukan dengan dasar jenis kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh OPD, sehingga aparatur dapat lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian pekerjaan yang dibebankan.

Tabel 3.3.2.

Progress Kinerja Misi Ketiga

Meningkatkan Kinerja Aparatur dengan Mengedepankan Prinsip Clean and Good Governance dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

SASARAN	HASIL			
	2016	2017	2018	2019
1. Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance)	n/a	100%	100%	100%
2. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur bidang perumahan dan permukiman	n/a	74,64%	162,79%	114,17 %
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2019				107,08 %

Dari tabel 3.3.2. dapat terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja Tahun 2019 untuk Meningkatkan Kinerja Aparatur dengan Mengedepankan Prinsip *Clean and Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman adalah sebesar107,08 % atau berada pada kategoriSangat Berhasil.

Adapun jenis program yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mendukung capaian kinerja misi ketiga yaitu:

Tabel 3.3.4.
Capaian Meningkatkan Kinerja Aparatur dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.079.480.000,00	1.847.147.151,00	88,83%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*	1.189.374.000,00	666.109.816,13	56,01%
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	162.000.000,00	161.287.500,00	99,56%
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	280.000.000,00	88.528.000,00	31,62%
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	407.420.000,00	297.511.500,00	73,02%
6.	Program Pelaksanaan kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar*	32.500.000,00	0	0%
	JUMLAH	**4.150.774.000,00**	**3.060.583.967,13**	**73,74%**

Ket: Termasuk didalamnya anggaran untuk penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga*

Berdasarkan tabel tersebut dilihat bahwa realisasi anggaran sudah mencapai 73,74%dari yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah dapat dikategorikan efektif, serapan anggaran ini sebagian besar dipengaruhi oleh penyelesaian kewajiban pada pihak ketiga untuk kegiatan OPD sebelumnya pada Tahun 2016 dan Tahun 2017. Kegiatan penunjang sasaran ini merupakan kegiatan-kegiatan rutin administrasi perkantoran sebagai pemenuhan kebutuhan pelayanan perkantoran sehari-hari, sehingga pencapaiannya dapat dikategorikan berhasil.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh OPD dalam hal peningkatan kinerja pendukung Misi Meningkatkan kinerja aparatur dengan mengedepankan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, maupun solusi yang diharapkan kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang akuntabel; peningkatan kualitas SDM dapat terwujud dengan bantuan dari OPD lain di Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja.
3. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SPIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian penetapan kinerja.

Tabel 3.4.

Resume Capaian Sasaran Penunjang Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir 2019

MISI	SASARAN	CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatkan pelayanan perumahan berkualitas bagi masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap perumahan layak huni	59,25 %	Cukup Berhasil
Rata-rata Capaian Misi 1		**59,25 %**	**Cukup Berhasil**
Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan utilitas kawasan permukiman	Berkurangnya luasan Kawasan Kumuh	16,58 %	Kurang Berhasil
	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman	90,61 %	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian Misi 2		**53,60 %**	**Kurang Berhasil**
Meningkatkan kinerja aparatur dengan mengedepankan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance)	100%	Sangat Berhasil
	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur bidang perumahan dan permukiman	114,17 %	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian Misi 3		**107,08 %**	**Sangat Berhasil**
Total Rata-rata Capaian Misi OPD		**73,31 %**	**Berhasil**

B. ASPEK KEUANGAN

Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dari hasil evaluasi dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan analisis mengenai penyebab tidak tercapainya rencana, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang.

1. Belanja Tidak Langsung

Adapun untuk melihat penggunaan dana APBD serta realisasinya pada belanja langsung dapat dilihat pada tabelberikut:

Tabel 3.5.

Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2019

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi(Rp)	Persentase (%)
1	Gaji dan Tunjangan	3.205.554.885,00	2.753.996.128,00	85,91
2	Tambahan Penghasilan PNS	2.351.355.000,00	2.163.705.000,00	92,02
	Total :	**5.556.909.885,00**	**4.917.701.128,00**	**88,50**

2. Belanja Langsung

Untuk penyerapan belanja langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6

Realisasi Belanja Langsung TA. 2019

No	Jenis Belanja	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Realisasi (%)
1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00
2	Belanja Barang dan Jasa	58.234.002.723,00	56.280.356.086,85	96,65
3	Belanja Modal	10.413.835.000,00	9.718.093.318,93	93,32
	Total :	**68.662.237.723,00**	**66.012.849.405,78**	**96,14**

Dari tabel 3.6 dapat terlihat bahwa realisasi belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 mencapai 96,14%. Sementara itu untuk dapat melihat persentase realisasi Tahun 2019berdasarkan rincian program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

No.	Uraian	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Realisasi (%)
1	Gaji dan Tunjangan	3.205.554.885,00	2.753.996.128,00	85,91
2	Tambahan Penghasilan PNS	2.351.355.000,00	2.163.705.000,00	92,02
3	ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran	2.079.480.000,00	1.847.147.151,00	88,83

4	ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur	1.189.374.000,00	666.109.816,13	56,01
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	162.000.000,00	161.287.500,00	99,56
6	ProgramPeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur	280.000.000,00	88.528.000,00	31,62
7	ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerjadanKeuangan	407.420.000,00	297.511.500,00	73,02
8	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	32.500.000,00	0,00	0,00
9	ProgramPembangunanTurap/Talud/Bronjong	5.900.000,00	5.900.000	100,00
10	ProgramPengembanganPerumahan	22.771.980.000,00	21.287.986.995,70	93,48
11	ProgramLingkunganSehatPerumahan	15.894.970.000,00	15.852.856.000,00	99,74
12	ProgramPemberdayaanKomunitasPerumahan	25.838.613.723,00	25.805.522.442,95	99,87
	Total :	**74.219.147.608,00**	**70.930.550.533,78**	**95,57**

Berdasarkan dari tabel tersebut, secara keseluruhanpenyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 95,57% dan dapat menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran.

C. EVALUASI KINERJA

Belum tercapainya indikator sasaran pada umumnya dipengaruhi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir, antara lain:

1) Belum adanya peraturan perundangan oleh pemerintah daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman.
2) Jauhnya jarak atau *gap* antara proyeksi penganggaran pada saat penyusunan RENSTRA dan penetapan IKU, terhadap realisasi tersedianya anggaran pertahunnya sehingga mempengaruhi proses penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang berdampak langsung pada output indikator capaian.
3) Beberapa point tugas dan fungsi OPD masih bersinggungan dan tumpang tindih dengan OPD lain, sehingga pada saat finalisasi RKPD2019, OPD belum mencantumkan beberapa program terkait indikator capaian rumah ibadah dan ruang terbuka non hijau yang

menunggu keputusan kepala daerah dalam penyelarasan program, tugas dan fungsi antar OPD.

4) Proses rasionalisasi anggaran yang berpengaruh pada output capaian kegiatan.
5) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara kuantitas maupun kualitas.
6) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang operasional.
7) Belum terbangunnya data kinerja sebagai pendukung pelaksanaan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan.

D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Segera membentuk kelompok kerja dan mengadakan FGD terkait penyusunan peraturan daerah yang mengatur tentang dasar hukum, fungsi, pola dan teknis pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman.
2) Revisi penetapan Indikator Kinerja Utama dengan mempertimbangkan rasionalisasi dan harmonisasi penganggaran.
3) Solusi untuk permasalahan ketiga sudah diambil langkah oleh BAPPEDA Rokan Hilir untuk penyelarasan program antar OPD yang memiliki fungsi serupa berupa Rapat Sinkronisasi dan Penyelarasan Program yang menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Penyelarasan Program Antar OPD.
4) Melakukan koordinasi awal dengan TAPD terkait kepastian pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
5) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir.
6) Melengkapi sarana prasarana pendukung.

7) Membangun data kinerja sehingga dapat dianalisa hasilnya untuk menentukan tingkat kegagalan dan keberhasilan organisasi dan upaya-upaya penyelesaiannya.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasa Permukiman berdasarkan suatu sistem akuntabilitas serta sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ke arah perbaikan di masa yang akan datang dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan *Good Governance.*

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja OPD pada tahun 2019 mencapai 73,31 % dengan kategori **berhasil.**

B SARAN

Tahun Anggaran 2019 pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah didasarkan komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang dilandasi dengan Rencana Strategis tahun 2017-2021. Secara ringkas seluruh capaian kinerja pada Tahun 2019 telah memberikan arah bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2019, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, sebagai berikut:

1) Menjadikan hasil kinerja Tahun 2019 sebagai langkah nyata untuk perbaikan perencanaan dan kinerja Tahun 2020 dengan mengantisipasi kegagalan pencapaian target Tahun 2019 dan mempertahankan keberhasilan yang diraih di Tahun 2019.

2) Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum.
3) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
4) Mekanisme pengumpulan data kinerja terus ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga pencapaian kinerja dapat dimonitor secara berkala dan didukung dengan informasi yang lebih akurat.
5) Meningkatkan pengalokasian penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
6) Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menggambarkan Capaian Kinerja Tiap Misi yang merupakan penjabaran dari Visi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun Anggaran 2019 ini diselesaikan, kami mengharapkan Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja selanjutnya.

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ROKAN HILIRTAHUN 2019

PENGARAH/PEMBINA	:	ZULFAHMI, ST. MT.
PENANGGUNG JAWAB	:	BUDI MULIA, SE. M.Si.
KETUA	:	RIO SAPUTRA, ST
SEKRETARIS	:	ASMADI, ST
ANGGOTA	:	1. ABDUL NASIR
		2. SYAFRIDAYANI

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ALAMAT : KOMPLEK PERKANTORAN BT.6 NO. TELP.(0767) FAX.(0767)
BAGANSIAPIAPI

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFAHMI, ST. MT.
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. SUYATNO
Jabatan : Bupati Rokan Hilir

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bagansiapiapi, 30 Oktober 2019

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
BUPATI ROKAN HILIR	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR
H. SUYATNO	ZULFAHMI, S.T.,M.T
	PEMBINA TINGKAT I NIP. 19740428 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Rokan Hilir

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap perumahan layak huni	Persentase Keluarga yang memiliki rumah layak huni	5,35%
2	Berkurangnya luasan Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya kawasan kumuh	10.67%
3	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman	Persentase jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	2.33%
		Persentase jembatan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	23.01%
		Persentase penerangan jalan di kawasan permukiman dalam kondisi baik	36.93%
		Persentase drainase di kawasan permukiman dalam kondisi baik	0.20%
		Persentase tingkat layanan air bersih kawasan permukiman berkondisi baik	36.70%
		Persentase tingkat layanan air limbah kawasan permukiman berkondisi baik	0.45%
		Persentase peningkatan kualitas rumah ibadah	0.70%
		Pesentase ruang terbuka non hijau berkondisi baik	11.10%
		Persentase sarana prasarana pemakaman yang berkondisi baik	28.1%
4	Terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance)	Nilai Evaluasi SAKIP Instansi	BB
		Level Maturitas SPPIP	Level 3
		Nilai Reformasi Birokrasi	C
5	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur bidang perumahan dan permukiman	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi bidang perumahan dan permukiman	63.00%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,079,480,000	APBDP
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,189,374,000	APBDP
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	162,000,000	APBDP
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	280,000,000	APBDP
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	407,420,000	APBDP
6	Program Pelaksanaan kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar	32,500,000	APBDP
7	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	5,900,000	APBDP
8	Program Pengembangan Perumahan	22,769,818,874	APBDP/DAK
9	Program Lingkungan Sehat Perumahan	15,894,970,000	APBDP/DAK
10	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	25,838,613,723	APBDP/DAK

Bagansiapiapi, 30 Oktober 2019

BUPATI ROKAN HILIR,

H. SUYATNO

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

ZULFAHMI, S.T.,M.T.
Pembina Tingkat I NIP. 19740428 200003 1 002